



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TRANSFORMASI SEPAK BOLA INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sepak bola populer di Indonesia dan dapat memberikan manfaat ekonomi, membangun karakter, dan meningkatkan nasionalisme. Namun, Indonesia mengalami kendala dalam kinerja sepak bola nasional karena infrastruktur buruk, sumber daya manusia (SDM) kurang berkualitas, manajemen dan tata kelola kurang efektif, serta minim dukungan pemerintah dan masyarakat. Pembatalan turnamen Piala Dunia FIFA U-20 2023 di Indonesia karena penolakan terhadap keikutsertaan tim Israel menimbulkan kontroversi dan berdampak pada prestasi sepak bola Indonesia yang masih rendah di tingkat internasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan transformasi sepak bola Indonesia.

Meskipun FIFA memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dana *forward* 3.0 untuk PSSI, FIFA tetap berkomitmen untuk membantu dan mengawasi transformasi sepak bola Indonesia. Transformasi merupakan komitmen bersama antara pemerintah, PSSI, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola nasional di tingkat regional dan internasional. Berbagai lini seperti infrastruktur, SDM, manajemen klub, tata kelola, dan regulasi harus diperhatikan secara serius.

Beberapa upaya sudah dilakukan dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia. *Pertama*, pemerintah bersama dengan FIFA membentuk tim transformasi sepak bola untuk mengembangkan standar keamanan stadion, protokol, prosedur, dan bantuan ahli untuk klub. *Kedua*, membentuk Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia (GTTSBI) untuk membuat peraturan khusus sesuai dengan aturan FIFA dan AFC. *Ketiga*, Liga Profesional Indonesia (LPI) telah dibentuk untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan PSSI menargetkan peringkat ke-70 dunia pada tahun 2026.

Transformasi sepak bola Indonesia didasarkan juga pada regulasi pengelolaan olahraga, yaitu UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (PP PK), dan Inpres No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Inpres PPPN). Ketiga landasan hukum ini memberikan pedoman bagi pemerintah, PSSI, dan masyarakat untuk pengembangan sepak bola di Indonesia dan memperbaiki aspek-aspek penting dalam sepak bola nasional, sehingga dapat mewujudkan tujuan transformasi sepak bola Indonesia. Regulasi lain, seperti Peraturan Liga 1 2020, Peraturan Stadion PSSI 2021, Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021, dan *FIFA Laws of the Game* 2021–2022 juga diterapkan untuk mengatur sistem dan pengembangan sepak bola Indonesia.

Implementasi peraturan tersebut masih mengalami kendala, seperti minimnya alokasi anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, ketaatan pada regulasi dan kebijakan, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi dan integrasi semua pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan transformasi sepak bola nasional. Organisasi sepak bola juga perlu menerapkan praktik tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan manajemen keuangan yang memadai; mempromosikan kesempatan yang sama (non-diskriminasi); dan menjaga integritas dan profesionalisme untuk mempersiapkan kompetisi internasional.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, transformasi memerlukan peta jalan (*roadmap*) dan cetak biru (*blueprint*) persepakbolaan nasional dan transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, diperlukan juga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, sepak bola Indonesia dapat berkembang dan bersaing di kancah internasional, seperti visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola Asia pada 2030.

Atensi DPR

DPR RI berperan penting dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Komisi X DPR RI dapat membantu transformasi tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. *Pertama*, mendorong pemerintah (Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan PSSI untuk membuat *roadmap* dan *blueprint*. *Kedua*, memberikan dukungan anggaran untuk transformasi sepak bola Indonesia. *Ketiga*, memberikan dukungan legislasi terhadap implementasi UU SKN dan advokasi regulasi/kebijakan. *Keempat*, memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan PSSI. *Kelima*, memperjuangkan pengurangan intervensi politik dalam sepak bola dan mendukung kemandirian PSSI. Dengan tindakan ini, transformasi sepak bola Indonesia akan berjalan lebih efektif dan optimal untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia secara nasional dan internasional.

Sumber

antaranews, 19 Oktober 2022;
beritasatu.com, 7 April 2023;
bola.com, 13 Oktober 2022;
bola.tempo.co, 7 April 2023;
idntimes.com, 7 April 2023;
Indonesia.go.id, 31 Maret 2023;
kemenpora.go.id, 20 Februari 2023;
kompas.co., 10 April 2023;
kompas.id, 8 April 2023;
liputan6.com, 7 April 2023;
medcom.id, 7 April 2023;
mediaindonesia.com, 6 April 2023;
menpan.go.id, 10 Oktober 2022;
muria.tribunnews.com, 10 April 2023;
parlementaria, April 2023;
presidenri.go.id, 18 Oktober 2022 dan 1 April 2023; dan
pssi.org-regulasi.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023